



**LAPORAN KINERJA
BIRO MANAJEMEN KINERJA,
ORGANISASI, DAN TATA KELOLA**

**TRIWULAN I
2022**

**OT.04/LPP-29/SU01/2/2022
31 MARET 2022**



Nomor : OT.04/LPP-29/SU01/2/2022
Hal : Laporan Kinerja Biro MKOT
Triwulan I Tahun 2022

31 Maret 2022

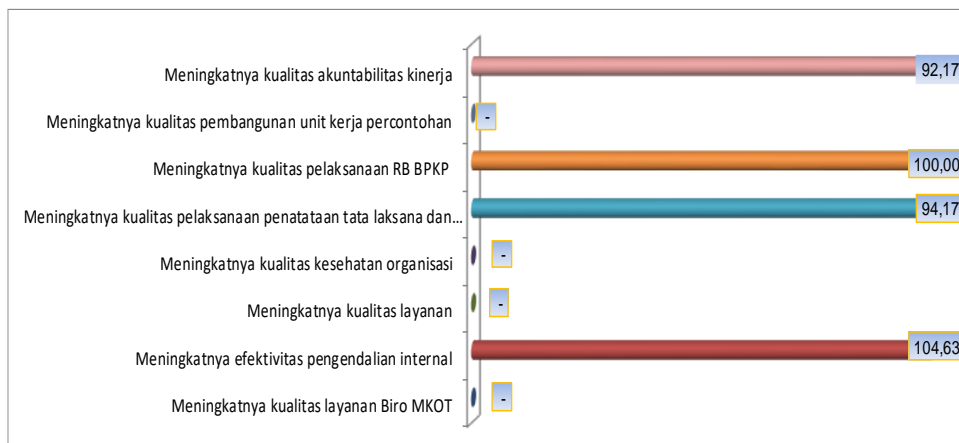
Yth.
Sekretaris Utama BPKP
di Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Kinerja Biro MKOT Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Simpulan

Biro MKOT mencapai kinerja sebesar 97,74%. Capaian tersebut merupakan rerata atas empat dari delapan sasaran kegiatan yang telah diukur. Empat sasaran kinerja kegiatan belum dapat diketahui capaian kinerjanya karena belum diukur. Capaian kinerja MKOT pada triwulan I tahun 2022 disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1
Capaian Kinerja Biro MKOT
Triwulan I Tahun 2022



Selain 8 sasaran kegiatan di atas, terdapat satu tambahan kegiatan terkait dengan Pengawasan dan Program STAR. Indikator Pengawasan dan Program STAR adalah, tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi, dengan capaian 100%. Rincian capaian kinerja Biro MKOT sampai dengan triwulan I tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja Kegiatan Biro MKOT Triwulan I Tahun 2022

No. Urut SK	No. Urut IKK	Kegiatan /Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target		Realisasi TW 1	Capaian (%)		Rerata Capaian s.d. TW I
				Tahun 2022	TW I 2022		Tahun 2022	TW I 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/6	10
Kegiatan: Pembinaan dan koordinasi layanan Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola									
1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja									
	1	IKK : Persentase dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	92,17
	2	IKK: Persentase keselarasan <i>cascading</i> kinerja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	3	IKK: Persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu	Persen	75,00	75,00	67,99	90,65	90,65	
	4	IKK: Persentase output pengawasan yang dihasilkan tepat waktu	Persen	75,00	75,00	69,59	92,79	92,79	
	5	IKK: Persentase ketercapaian target <i>output</i>	Persen	100,00	100,00	69,59	69,59	69,59	
	6	IKK: persentase laporan kinerja tepat waktu	Persen	100,00	18,18	18,18	18,18	100,00	
2 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pembangunan unit kerja percontohan									
	7	IKK 1: Jumlah unit kerja yg diusulkan WBK ke TPN	Unit Kerja	24	-	-	-	-	Belum diukur
	8	IKK 1: Jumlah unit kerja yg diusulkan WBBM ke TPN	Unit Kerja	3	-	-	-	-	
3 Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB BPKP									
	9	IKK 1: Persentase rencana aksi RB tahunan yang terlaksana	Persen	100,00	20,91	20,91	20,91	100,00	100,00
4 Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan tata laksana dan organisasi									
	10	IKK 1: Nilai efektivitas struktur	Nilai	81,00	81,00	72,03	88,93	88,93	94,17
	11	IKK 2: Nilai efektivitas proses	Nilai	81,00	81,00	80,52	99,41	99,41	
5 Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kualitas kesehatan organisasi									
	12	IKK 1: <i>Persentase area of improvement</i> yang selesai ditindaklanjuti	Persen	100,00	-	-	-	-	Belum diukur
6 Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya kualitas layanan									
	13	IKK1: Jumlah unit yang meningkat indeks kepuasan layanan BPKP	Jumlah	20	-	-	-	-	Belum diukur
	14	IKK 2: Persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti	Persen	85,00	-	-	-	-	
7 Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya efektivitas pengendalian internal									
	15	IKK 1: Persentase penyelesaian RTP (BPKP dan unit kerja)	Persen	100,00	16,08	11,18	11,18	69,53	104,63
	16	IKK 2: Persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan unit kerja)	Persen	65,00	65,00	90,83	139,74	139,74	
8 Sasaran Kegiatan 8: Meningkatnya kualitas layanan Biro MKOT									
	17	IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro MKOT	Skala 10	8,16	-	-	-	-	Belum diukur

B. Agenda Prioritas Dukungan Pengawasan

Capaian kinerja terkait Agenda Prioritas Dukungan Pengawasan (APDP) Biro MKOT triwulan I tahun 2022 adalah 100,00%, yaitu realisasi 5 tema, 8 topik, dan 18 butir hasil yang diharapkan dari target 5 tema, 8 topik, dan 18 butir hasil yang diharapkan. Rincian lima tema dengan delapan topik. Tema dan topik APDP tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Target APDP Biro MKOT Triwulan I Tahun 2022

NO.	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN
1	Manajemen Kinerja Pengawasan	Desain Manajemen Pengawasan Terintegrasi	Konvergensi seluruh segmen dan sektor APP 2022
2			Keselarasan antara sasaran strategis pada renja dengan APP (Pemetaan SK dan PKPT)
3			Keselarasan KAP dan PKPT dengan APP
4			Kesesuaian komposisi penganggaran dengan rencana pengawasan (PKPT)
5			Konsep Integrasi Data Manajemen Pengawasan
6		Perencanaan dan Penganggaran Pengawasan	Mekanisme revisi PKPT APP
7			Pemetaan dan pemerataan beban kerja dan RMP
8			Monitoring RPL dan RMP
9		Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Pemantauan sequencing hasil pengawasan kontributor dan sintesisnya
10			Mekanisme Sintesa Hasil Pengawasan Strategis
11		Analisa dan Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Mekanisme pengusulan PKPT pengganti APP
12			Ikhtisar Hasil Pengawasan
13		Manajemen SDM	Analisis Beban Kerja
14	Tata Kelola Pengawasan	Proses Bisnis Pengawasan	Pendampingan Penyusunan Pedoman & SOP sintesa pengawasan
15	Pengendalian Internal	Pengawasan atas Tata Kelola	Penyusunan risiko pengawasan APP dan risiko dukungan pengawasan
16			Pemantauan indikator risiko pengawasan APP
17			Mitigasi risiko pelaksanaan penugasan
18	Publikasi Hasil Pengawasan	Distribusi hasil pengawasan kepada <i>stakeholders</i>	Penyampaian hasil pengawasan tepat waktu

Rincian realisasi APDP disajikan pada Lampiran I.

C. Uraian Capaian Kinerja

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja

Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 92,17%. Capaian kinerja ini diukur dengan 5 indikator kinerja kegiatan, yaitu: 1) Persentase dokumen perencanaan tepat waktu, 2) Persentase keselarasan *cascading* kinerja, 3) Persentase pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu, 4) Persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu, 5) Persentase ketercapaian target *output*, dan 6) Persentase Laporan Kinerja Tepat Waktu. Uraian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu

Capaian kinerja dengan indikator persentase dokumen perencanaan tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 adalah 100,00%, yaitu realisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen perencanaan. Indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase dokumen perencanaan tepat waktu diukur berdasarkan realisasi dokumen perencanaan yang diterbitkan.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja di atas adalah terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak internal, antara lain Kedeputian selaku rendal, Unit Kerja Perwakilan, Pusat-Pusat, Inspektorat dan Biro-Biro di lingkungan BPKP. Selain itu, konvergensi pengawasan sudah jelas dan terarah berdasarkan topik agenda prioritas pengawasan (APP), agenda prioritas pengawasan daerah (APPD), dan agenda prioritas dukungan pengawasan (APDP) sehingga lebih mudah dalam menurunkan ke dalam dokumen Perkin.

2) Persentase Keselarasan *Cascading* Kinerja

Capaian kinerja dengan indikator persentase keselarasan *cascading* kinerja pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 100,00%, yaitu realisasi 6 dari target 6 *cascading* kinerja Eselon I. IKK persentase keselarasan *cascading* kinerja diukur berdasarkan jumlah dokumen *cascading* kinerja yang tersusun dibandingkan dengan jumlah *cascading* kinerja yang seharusnya.

Penyusunan *cascading* telah mengacu pada Pohon Kinerja BPKP, yang secara garis besar memiliki enam Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi Sasaran Program yang menjadi tanggung jawab masing-masing Deputi Kepala BPKP dan Sekretaris Utama. Rincian *cascading* Indikator Kinerja Utama ke dalam Indikator Kinerja Program disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Cascading Kinerja Tahun 2022

No.	Uraian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	3	12
2	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	12
3	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	3	9
4	Deputi Bidang Akuntan Negara	5	14
5	Deputi Bidang Investigasi	5	8
6	Sekretariat Utama	6	7

3) Persentase Rencana Pelaksanaan Pengawasan yang Tepat Waktu

Capaian kinerja persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 90,65%, yaitu realisasi 67,99% dari target 75%. IKK persentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu diukur dengan cara membandingkan realisasi PKPT yang terbit sesuai dengan rencana mulai penugasan (RMP) dengan target PKPT triwulan I. Target presentase rencana pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 adalah 75%. Realisasi pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 adalah 67,99%, yaitu 1.075 dari 1.581. Rincian target, realisasi, dan capaian pelaksanaan penugasan tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Target, Realisasi, dan Capaian Pelaksanaan Penugasan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	
		Setahun	s.d. TW I		Setahun	s.d. TW I
1	Direktorat & Pusbin JFA	652	208	185	28,37	88,94
2	Perwakilan	3690	1.373	890	24,12	64,82
	Jumlah	4.342	1.581	1.075	24,76	67,99

Sumber Data: monsima per 31 Maret 2022

Upaya-upaya yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain:

- Melakukan pemantauan *output* pengawasan dalam aplikasi SIMA.
- Menginisiasi penerbitan kebijakan teknis manajemen kinerja dan anggaran, sebagaimana tertuang dalam SE-3/SU/01/2022
- Melakukan dialog kinerja dengan seluruh unit kerja.

Rencana tindak untuk meningkatkan kinerja adalah:

- Mereposisi tim pemantau kinerja.
- Memastikan kesiapan Rendal terkait pelaksanaan kinerja di awal triwulan 2/2022.

4) Persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu

Capaian kinerja persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 92,79%, yaitu realisasi 69,59% dari target 75%. IKK persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu diukur dengan membandingkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang terbit sesuai dengan rencana penerbitan laporan (RPL) dibagi dengan jumlah LHP terbit. Target IKK tersebut triwulan I tahun 2022 adalah 75%. Realisasi persentase *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 69,59%, yaitu realisasi 675 dari target 970. Rincian target, realisasi, dan capaian *output* pengawasan yang dihasilkan tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Target, Realisasi, dan Capaian *Output* Pengawasan yang Dihasilkan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	
		Setahun	s.d. TW I		Setahun	s.d. TW I
1	Direktorat & Pusbin	652	166	64	9,82	38,55
2	Perwakilan	3690	804	611	16,56	76,00
	Jumlah	4342	970	675	15,55	69,59

Sumber Data: monsima per 31 Maret 2022

5) Persentase Ketercapaian Target *Output*

Capaian kinerja persentase ketercapaian target *output* pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 69,59%, yaitu realisasi 69,59% dari target 100%. IKK persentase ketercapaian target *output* merupakan perwujudan kemampuan BPKP dalam merealisasikan penugasan yang telah direncanakan dalam PKPT. IKK tersebut diukur dengan cara membandingkan antara realisasi laporan atas penugasan pengawasan dengan target *output* triwulan I tahun 2022. Target IKK tersebut triwulan I tahun 2022 adalah 100%. Realisasi persentase ketercapaian target *output* triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 69,59%, yaitu realisasi 675 dari 970 laporan. Rincian target, realisasi dan capaian output BPKP pada triwulan I tahun 2022 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Target, Realisasi, dan Capaian *Output* BPKP triwulan I Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	
		Setahun	s.d. TW I		Setahun	s.d. TW I
1	Direktorat & Pusbin	652	166	64	9,82	38,55
2	Perwakilan	3690	804	611	16,56	76,00
	Jumlah	4.342	970	675	15,55	69,59

Sumber Data: monsima per 31 Maret 2022

6) Persentase Laporan Kinerja Tepat Waktu

Capaian kinerja persentase laporan kinerja tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 adalah 100%, yaitu realisasi 3 dari 3 laporan kinerja yang ditargetkan. Capaian

tersebut merupakan 18,18% dari target tahun 2022 yang sebanyak 22 laporan. IKK “Persentase laporan kinerja tepat waktu” diukur dengan jumlah realisasi *output* laporan kinerja yang diselenggarakan oleh MKOT dibandingkan dengan target *output* laporan kinerja yang diselenggarakan oleh MKOT pada tahun yang sama.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas adalah:

- a. Koordinasi dengan unit kerja dilaksanakan di awal rencana penyusunan laporan.
- b. Menginformasikan atau mengingatkan kembali kepada unit kerja baik melalui *WhatsApp Group* maupun surat edaran untuk meng-*entry* data secara tepat waktu.
- c. Bekerja sama dengan Pusinfowas dalam mengembangkan *dashboard* Monsima.

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Unit Kerja Percontohan

Capaian kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Unit Kerja Percontohan” Biro MKOT pada triwulan I tahun 2022 masih nihil karena belum ada pengusulan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan dua IKK yaitu:

1) Jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke TPN

IKK jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke TPN dihitung berdasarkan jumlah unit kerja yang diusulkan WBK ke TPN, dengan target sebanyak 24 unit kerja. Pengusulan unit kerja ke TPN akan dilakukan pada triwulan II tahun 2022.

2) Jumlah unit kerja yang diusulkan WBBM ke TPN

IKK jumlah unit kerja yang diusulkan WBBM ke TPN dihitung berdasarkan jumlah unit kerja yang diusulkan WBBM ke TPN. Pengusulan unit kerja ke TPN akan dilakukan pada triwulan II tahun 2022.

3. Sasaran Kegiatan: meningkatnya kualitas pelaksanaan RB BPKP

Capaian kinerja meningkatnya kualitas pelaksanaan RB BPKP pada triwulan I tahun 2022 adalah 100%, yaitu realisasi 20,91% dari target 20,91%. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB BPKP” memiliki satu IKK, yaitu “Persentase rencana aksi RB tahunan yang terlaksana”. Target IKK tersebut dihitung berdasarkan perbandingan jumlah realisasi rencana aksi RB BPKP dibandingkan dengan target. Realisasi persentase rencana aksi RB tahunan yang terlaksana pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 20,91%, yaitu realisasi 23 dari 23 kegiatan renaksi yang ditargetkan. Target persentase rencana aksi RB tahunan yang terlaksana sebesar 20,91% merupakan target triwulan I tahun 2022 yang dihitung dari target 23 renaksi di triwulan 1 dari 110 renaksi dalam tahun 2022.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan:

Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*) melalui pembentukan Satgas RB Pusat dan Unit Kerja Mandiri.

b. Deregulasi Kebijakan:

Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan *overlapping* peraturan) melalui mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan pemetaan terhadap regulasi yang ada, untuk mengurangi regulasi yang dianggap tidak relevan/ tumpang tindih;

c. Penataan Tata Laksana:

Penerapan Layanan SPBE melalui: Pemanfaatan SPBE dalam setiap penugasan pada program-program sasaran strategis BPKP;

d. Penataan Sistem Manajemen SDM:

- Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system* melalui:
1) Mengimplementasikan disiplin/kode etik/kode perilaku, *reward* dan *punishment* serta sistem merit dengan proporsional agar menjaga *engagement* dan loyalitas pegawai; 2) Melakukan *fit and proper test* dalam proses seleksi jabatan; 3) Menyusun peraturan pengembangan karir di lingkungan BPKP; 4) Mengumumkan hasil seleksi jabatan terbuka secara luas dengan memanfaatkan berbagai media.
- Penetapan ukuran kinerja individu melalui: Menyempurnakan penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir dan pemberian tunjangan kinerja dengan menggunakan Pohon Kinerja sebagai acuan *cascading* kinerja individu.
- Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala: 1) Monitoring dan evaluasi kinerja individu setiap bulan; dan 2) Sosialisasi, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan penilain kinerja individu;
- Penguatan implementasi *Reward and Punishment* Berdasarkan kinerja melalui: 1) Monitoring dan evaluasi kinerja individu setiap bulan; dan 2) Sosialisasi, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan penilain kinerja individu;
- Penguatan implementasi *Reward and Punishment* Berdasarkan kinerja melalui: Mengimplementasikan *reward* dan *punishment* untuk menjaga *engagement* dan loyalitas pegawai;
- Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi melalui: 1) Menyampaikan analisis kebutuhan SDM di unit kerja (ABKJ / ABKF Unit Kerja); dan 2) Menempatkan SDM sesuai kebutuhan dan alokasi;

e. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan peran serta pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja melalui 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kinerja, pemantauan progres kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan hasil kinerja; dan 2) Penyusunan Perkin Eselon I (mengacu Renstra Kedeputan dan Renstra BPKP) dan diturunkan berjenjang kedalam Perkin Eselon II, Eselon III dan SKP;

f. Penguatan Pengawasan

- Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi melalui: 1) Mengimplementasikan SPIP di unit kerja BPKP; dan 2) Menyusun laporan secara berkala atas implementasi SPIP di setiap unit kerja ,melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan implementasi SPIP, penunjukan tim pemantau pelaksanaan implementasi di setiap unit kerja melalui Nota Dinas;
- Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan melalui: Pengembangan kompetensi pegawai dengan mengikuti diklat PBJ;
- Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM melalui Meningkatkan pembangunan zona integritas secara intensif sesuai pedoman pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPKP;

g. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan melalui: Perbaikan proses bisnis dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan anti penyuapan ISO 37001:2016;
- Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik melalui: 1) Menyusun SOP tentang kompensasi, reward, dan punishment atas implementasi pelayanan publik; dan 2) Sosialisasi dan internalisasi SOP tentang kompensasi, reward, dan punishment atas implementasi pelayanan public;
- Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik melalui: Perbaikan proses bisnis dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan anti penyuapan ISO 37001:2016;

4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan tata laksana dan organisasi

Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan tata laksana dan organisasi pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 94,17%. Sasaran kegiatan ini diukur dengan dua IKK, yaitu 1) nilai efektivitas struktur dan 2) nilai efektivitas proses, dengan uraian sebagai berikut:

1) Nilai Efektivitas Struktur

Capaian kinerja dengan indikator nilai efektivitas struktur pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 88,93%, yaitu realisasi 72,03 dari target 81,00. IKK nilai efektifitas struktur diukur melalui survei berdasarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur organisasi. Evaluasi kelembagaan dilakukan melalui pengisian kuesioner dan akan dilakukan secara berkala minimal tiga tahun sekali. Penilaian IKK nilai efektivitas struktur tahun 2022 akan dilaksanakan pada triwulan III s.d. IV. Realisasi IKK sampai dengan triwulan I tahun 2022 masih mengacu pada hasil tahun 2021 dengan nilai sebesar 72,03.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam triwulan I tahun 2022 sekaligus penataan kelembagaan berkelanjutan paska terbitnya Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) antara lain:

- a. Penetapan dan Penerbitan Peraturan BPKP Penyederhanaan Birokrasi
Peraturan BPKP nomor 3 tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Koordinator, dan Subkoordinator di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2022).
- b. Penetapan dan Penerbitan Keputusan Kepala BPKP tentang Tunjangan Kinerja Pascapenyetaraan
Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-38/K/SU/2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Bagi Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya Selaku Koordinator dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda Selaku Subkoordinator pada tanggal 31 Januari 2022.

c. Penyesuaian Draf Peraturan BPKP tentang Uraian Jabatan di Lingkungan BPKP

Menindaklanjuti Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, dan Surat Sekretaris Utama Nomor S-109/SU/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Rencana Aksi atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Penyetaraan JA ke dalam JF dan Penetapan Pertauran BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, perlu ditetapkan pengaturan yang berkaitan dengan uraian jabatan di lingkungan BPKP. Sampai dengan TW I 2022 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Finalisasi uraian tugas dan informasi jabatan Koordinator dan Subkoordinator yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Habis Pakai mulai dari perencanaan sampai dengan penatausahaan pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Menyusun dan menyesuaikan draf Keputusan Kepala BPKP tentang Uraian Tugas di Lingkungan BPKP sesuai dengan hasil *legislative drafting* oleh biro hukum dan komunikasi.
- (3) Menyusun draf peraturan BPKP tentang Pencabutan Peraturan-Peraturan Kepala BPKP yang berkaitan dengan Uraian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum pada Lingkungan BPKP.

d. Internalisasi Peraturan-Peraturan BPKP yang Terkait Penyederhaan Birokrasi Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 9 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP dan Peraturan BPKP nomor 3 tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Koordinator, dan Subkoordinator di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

e. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

Sebagai upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi setelah penataan kelembagaan, telah ditetapkan 29 Rencana Aksi atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Penyetaraan JA ke dalam JF melalui Surat Sekretaris Utama Nomor S-109/SU/01/2022 tanggal 18 Januari 2022. Rencana aksi tersebut melibatkan seluruh Biro-Biro, Pusat-Pusat, dan Inspektorat.

f. Pembahasan Langkah-Langkah Strategis Draf Perubahan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

Dalam rangka penataan organisasi termasuk perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 jo. Perpres 78 Tahun 20221 tentang Badan riset dan Inovasi Nasional (BRIN), telah diselenggarakan kegiatan rapat pembentukan Tim Perumus Materi dan perancangan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyusun draf perubahan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP pada tanggal 10 Februari 2022 melalui *Zoom Cloud Meeting*.

2) Nilai Efektivitas Proses

Capaian kinerja indicator nilai efektivitas proses pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 99,41%, yaitu realisasi 80,52 dari target 81. IKK nilai efektifitas proses

diukur melalui survei berdasarkan indikator dimensi-dimensi proses organisasi. Evaluasi kelembagaan dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh 53 responden yang mewakili Unit Kerja di lingkungan BPKP, yaitu Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat, Pusat-Pusat, dan seluruh Perwakilan. Hasil Nilai Efektivitas Proses menunjukkan skor sebesar 80,52 atau berada pada peringkat komposit 5 (P-5). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi proses, organisasi tergolong sangat efektif. Proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

a. Pemantauan Pedoman APP BPKP Tahun 2022

Biro MKOT membuat sebuah modul aplikasi pemantauan atas *due process* penyusunan pedoman APP Tahun 2022 yang disusun oleh unit rendal di BPKP.

Modul Pemantauan Pedoman APP dapat diakses oleh rendal pengampu sektor, tema, dan topik APP pada Aplikasi E-TOP.

b. Penyusunan Kajian Evaluasi Pedoman Umum Penyusunan Pedoman

Aturan yang berlaku saat ini adalah Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-1391/K/SU/2008 tentang Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan BPKP. Kebijakan tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan konvergensi pengawasan saat ini, dan Biro MKOT perlu melakukan pembaharuan terhadap kebijakan di atas agar selaras dengan APP BPKP.

Kebijakan baru yang akan disusun perlu didukung oleh kajian terhadap hal-hal yang perlu di atur dalam revisi kebijakan yang akan dilakukan. Pada Triwulan I ini, kajian yang dilakukan masih dalam tahap studi literatur mengenai *benchmark* atau perbandingan pedoman pengawasan di negara lain. Selain itu, sudah dilakukan penyebaran kuesioner yang diisi oleh beberapa pegawai di Perwakilan BPKP, antara lain Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Hasil analisis dari kuesioner terhadap KEP-1391/K/SU/2008 tentang Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan BPKP menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa KEP-1391/K/SU/2008 tentang Panduan Umum Penyusunan Pedoman di Lingkungan BPKP perlu segera diperbaharui untuk dapat mendukung pelaksanaan penyusunan pedoman APP.

c. Pelaksanaan Validasi KAK Pedoman

Proses validasi KAK dilakukan untuk memastikan kesesuaian KAK dengan prinsip-prinsip penyesunan pedoman, kesesuaian dengan Prosedur Penyusunan Pedoman dan Proses Bisnis, serta kesesuaian dengan Format KAK Penyusunan Pedoman.

Saat ini validasi KAK telah berjalan dan menghasilkan tujuh hasil validasi terhadap KAK yang diajukan oleh unit kerja rendal penanggung jawab melalui Aplikasi E-TOP. Adapun KAK Pedoman yang sudah dilakukan validasi adalah sebagai berikut:

(1) KAK Pedoman Topik APP Pembangunan Bandara Tahun 2022;

- (2) KAK Pedoman Penyusunan Topik APP Pembangunan Jalur Kereta Api Tahun 2022;
 - (3) KAK Pedoman Topik APP Pembangunan Pelabuhan Tahun 2022;
 - (4) KAK Pedoman Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) TA 2022;
 - (5) KAK Pedoman Pengawasan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Non-APP);
 - (6) KAK Pedoman Topik APP Penanganan Covid-19 - Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - (7) KAK Pedoman Pengawasan Optimalisasi Program Padat Karya.
- d. Internalisasi Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPKP
Biro MKOT telah melaksanakan internalisasi Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPKP secara luring/tatap muka.
- e. Pelaksanaan Validasi SOP
Validasi SOP dilaksanakan dengan tujuan agar kualitas SOP yang dihasilkan sesuai dengan standar dan meyakinkan langkah-langkah yang ada dalam SOP sudah disusun secara efektif dan efisien. Sampai dengan triwulan I 2022 Biro MKOT telah melaksanakan validasi SOP sebanyak dua belas SOP Bagian PPKO, dan 19 SOP Bagian SPIP RB. Bagian Organisasi dan Tata Laksana membantu dalam pengesahan SOP milik Bagian PPKO menjadi Surat Keputusan Sesma. Untuk SOP Bagian SPIP RB saat ini sedang dalam pengajuan draf Surat Keputusan Sesma.
- f. Koordinasi Digitalisasi Arsip
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD), ditetapkan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai AUBKD dan berlaku secara nasional.
Sehubungan dengan itu, telah diadakan rapat koordinasi di lingkungan BPKP antara Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Pusinfowas, Biro Umum, Biro SDM, ANRI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengintegrasikan Aplikasi Srikandi dengan aplikasi lain yang ada di lingkungan BPKP.
- g. Penyempurnaan Peta Proses Bisnis
Dari hasil evaluasi atas Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP, perlu dilaksanakan perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis. Atas dasar tersebut telah disusun konsep revisi atas Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP dan konsep Keputusan Sekretaris Utama tentang Peta Subproses, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi pada Peta Proses Bisnis BPKP. Konsep revisi tersebut telah dilakukan sejak tahun 2021 dan sampai dengan saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

5. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Organisasi

Capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas kesehatan organisasi pada triwulan I tahun 2022 belum dapat diketahui karena belum diukur. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Organisasi” diukur dengan satu IKK, yaitu persentase *area of improvement* (Aoi) yang selesai ditindaklanjuti, dengan target 100%. Tindak lanjut atas Aoi akan dilakukan mulai triwulan II tahun 2022.

Terhadap hasil survei IKO tahun 2021, tim IKO melakukan analisis lebih lanjut untuk menghasilkan beberapa area perbaikan yang tepat dan terarah. Kegiatan tersebut telah dilakukan antara bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2022. Analisis tersebut dilakukan melalui berbagai metode, yaitu dengan menggunakan metode analisis faktor, prosedur telaah data kualitatif, observasi, serta *Focus Grup Discussion* (FGD).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Triwulan I 2022, beberapa rencana tindak yang akan dilakukan pada triwulan II s.d. IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Atas Aoi yang telah disusun, dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan beberapa unit berkompeten dan membidangi Aoi tersebut dan menyusun rencana tindak lanjut (Triwulan II).
- b. Pemantauan tindak lanjut Aoi (Triwulan II s.d. IV)
- c. Melakukan evaluasi atas pengukuran Indeks Kesehatan BPKP Tahun 2021 dan penyusunan kebijakan pengukuran Indeks Kesehatan BPKP Tahun 2022 (Triwulan III)
- d. Pengukuran dan Analisis Indeks Kesehatan BPKP Tahun 2022 (Triwulan IV).

6. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan

Capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan pada triwulan I tahun 2022 belum dapat diketahui karena belum diukur. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan” memiliki dua Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu 1) jumlah unit yang meningkat indeks kepuasan layanan BPKP dan 2) persentase rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti. Pengukuran baru akan dilakukan pada triwulan IV 2022.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja, sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik
- b. Mendampingi Pusdiklatwas pada Penilaian Indeks Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kemenpan-RB.
- c. Mendampingi unit kerja dalam penentuan *customer list survey* persepsi pelayanan publik

7. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern

Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 104,63%. Sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengendalian internal” memiliki dua IKK, yaitu 1) persentase penyelesaian RTP (BPKP dan Unit Kerja) dan 2) persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan Unit Kerja). Capaian kinerja masing-masing IKK tersebut adalah 69,53% dan 139,74%, dengan uraian sebagai berikut:

1) Persentase penyelesaian RTP

Capaian IKK Persentase penyelesaian RTP (BPKP dan Unit kerja) triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 69,53%. Capaian IKK tersebut dihitung dari perbandingan persentase RTP yang terealisasi triwulan I tahun 2022 (11,18%) dengan persentase RTP yang terjadwal triwulan I tahun 2022 (16,08%).

2) Persentase efektivitas pengendalian intern

Capaian IKK Persentase efektivitas pengendalian intern (BPKP dan Unit kerja) triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 139,74%. Capaian IKK tersebut dihitung dari perbandingan persentase jumlah risiko yang termitigasi triwulan I tahun 2022, dengan persentase jumlah risiko yang teridentifikasi pada triwulan I tahun 2022. Persentase jumlah risiko yang termitigasi triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 90,83%, yaitu realisasi 1.693 risiko termitigasi dari target 1.864 risiko teridentifikasi termitigasi (65%).

8. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Biro MKOT

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro MKOT” memiliki satu IKK, yaitu “Indeks Kualitas Layanan Biro MKOT”. Indikator kinerja ini diukur dengan metode persepsi melalui kuesioner yang disebarakan kepada para responden yang berhubungan langsung dengan layanan maupun yang terdampak. Penilaian indeks kualitas layanan Biro MKOT tahun 2022 akan dilaksanakan pada Triwulan ke IV.

D. Output Kegiatan

Capaian kinerja output kegiatan Biro MKOT triwulan I tahun 2022 mencapai sebesar 100%. Rincian capaian *output* kegiatan Biro MKOT tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Capaian *Output* Kegiatan Triwulan I Tahun 2022 pada Biro MKOT

No.	Rincian Output (RO)	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			Tahun 2022	s.d. TW I		Tahun 2022	s.d. TW I
1	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100	100
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	1	100	100
3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	1	100	100
4	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	1	1	1	100	100
5	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	100	100
Jumlah						100	100

Capaian kinerja *output* kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran Biro MKOT

Realisasi *output* layanan perkantoran Biro MKOT triwulan I tahun 2022 sebanyak satu layanan atau mencapai 100% dari target tahun 2022. *Output* tersebut dicapai melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor.

2. Layanan Perencanaan

Realisasi *output* layanan perencanaan s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak satu layanan atau mencapai 100% dari target tahun 2022. *Output* tersebut dicapai melalui beberapa kegiatan, seperti rapat koordinasi, pembahasan, maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dengan unit-unit kerja, yang menghasilkan dokumen perencanaan, yaitu dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3. Layanan Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Organisasi

Realisasi *output* layanan pemantauan dan pelaporan kinerja organisasi s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak satu dokumen atau mencapai 100% dari target triwulan I. *Output*

tersebut dicapai melalui beberapa kegiatan yang menghasilkan empat laporan sebagai berikut:

- 1) LKj Sekretariat Utama Tahun 2021.
- 2) LKj BPKP Tahun 2021.
- 3) Laporan Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP39/2006 BPKP Triwulan IV Tahun 2021
- 4) LKj Biro MKOT Triwulan I Tahun 2022

4. Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana

Target rincian *output* secara total berupa satu layanan dan telah terealisasi sebanyak satu layanan. Dalam satu layanan tersebut telah dihasilkan 28 rincian *output* pada triwulan I tahun 2022 untuk penataan organisasi dan tata laksana dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penataan dan Evaluasi Organisasi, Analisis dan Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja, realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah sebanyak sembilan dokumen.
- 2) Kegiatan Penataan dan Evaluasi Proses Bisnis dan Prosedur Kerja, realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah sebanyak enam belas dokumen

5. Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi

Output Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi triwulan I tahun 2022 dicapai dengan 4 kegiatan dari total 11 *output* kegiatan tahun 2022. Rincian dan *output* kegiatan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Manajemen risiko
- 2) Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Output kegiatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB sebanyak tiga dokumen.

E. Kinerja Lainnya

Biro MKOT juga menghasilkan kinerja lain sebagai berikut:

1. Koordinasi perencanaan kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi pengawasan

Kegiatan koordinasi perencanaan kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi pengawasan memiliki satu sasaran kegiatan yaitu tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi pengawasan.

Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi pengawasan triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 50%. Sasaran kegiatan tersebut memiliki dua IKK, yaitu 1) tersedianya dokumen kebijakan pengawasan intern nasional; dan 2) tersedianya metodologi pengawasan. Capaian masing-masing IKK tersebut pada tahun 2021 adalah masing-masing nihil dan 100%. Uraian masing-masing IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengawasan Intern Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pengawasan yang tertuang dalam Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024, BPKP menetapkan kebijakan pengawasan Intern Nasional sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BPKP setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, BPKP telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022 “Tanggung Mengawasi, Pulihkan Negeri” yang terdiri dari 7 sektor, 29 tema, dan 101 topik. Selain itu, diterbitkan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2022 “Mengawal Langkah, Membangun Daerah” yang terdiri dari 8 sektor dan 66 tema yang tersebar di 34 provinsi.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan kinerja BPKP Tahun 2022, APP dan APPD sebagai kebijakan pengawasan BPKP Tahun 2022. Selain itu, BPKP telah menyusun Agenda Prioritas Dukungan Pengawasan (APDP) sebagai kebijakan pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan (*enablers* BPKP) yang mempunyai peran strategis untuk memampukan BPKP untuk mencapai tujuan organisasi.

2) Tersedianya metodologi pengawasan

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja BPKP, diperlukan metodologi pengawasan yang handal. Oleh karena itu, Biro MKOT melakukan Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan yang melibatkan Direktorat Perencanaan (PAEP) maupun Unit Rendal Kedeputian. Selain itu, dalam mendukung tersedianya metodologi pengawasan BPKP akan dilaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri (*STAR Additional Financing*). Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, Biro MKOT melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan RI.

Capaian *output* kegiatan pengawasan pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 100% dan kegiatan STAR masih nihil. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersedianya kebijakan pengawasan intern nasional dan pengembangan metodologi pengawasan, dilakukan beberapa kegiatan. Rincian capaian *output* kegiatan triwulan I tahun 2022 pada Biro MKOT disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Capaian *Output* Kegiatan Triwulan I Tahun 2022 pada Biro MKOT

No.	Rincian Output (RO)	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			Tahun 2022	s.d. TW I		Tahun 2022	s.d. TW I
	Hasil Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	Kegiatan	4	1	1	25	100
	Sub Jumlah Pengawasan		4	1	1	25	100
1	Hasil Peningkatan Sarana Teknologi Pengawasan	Unit	3.354	-	-	-	-
2	Hasil Kompetensi dan Kebutuhan Instiusional berdasarkan Pendekatan E-Learning	Laporan	1	-	-	-	-
3	Hasil Dukungan Pengelolaan Proyek STAR	Laporan	1	-	-	-	-
4	Hasil Penguatan Institusi melalui Pengembangan Sistem	Laporan	2	-	-	-	-
	Sub Jumlah STAR					-	-
	Jumlah						

Sampai dengan triwulan I, capaian *output* sebanyak satu kegiatan koordinasi atau mencapai 100% dari target triwulan I. Aktivitas yang telah dilakukan dalam mendukung capaian *output* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran BPKP Tahun 2022 dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;
- b. Koordinasi tentang reviu *baseline* anggaran BPKP Tahun 2023 dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;
- c. Penyusunan Desain Manajemen Kinerja Pengawasan;

- d. Penyusunan Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Koordinasi pelaksanaan penandatangan Pakta Integritas di lingkungan Sekretariat Utama BPKP;
3. Pembahasan Penyusunan Modul/Kurikulum Diklat *Training of Trainers* (ToT) Mitigasi Risiko Perencanaan (MRP);
4. Pembahasan Aplikasi Manajemen Risiko Nasional (Aplikasi *E-Risk*) dengan konsultan.

F. Penggunaan Dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Penggunaan Dana

Capaian penggunaan dana pada Biro MKOT triwulan I tahun 2022 mencapai Rp1.645.252.770,00 atau 47,34% dari anggaran triwulan I tahun 2022 yang sebesar Rp3.475.695.550,00. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi anggaran rutin/reguler sebesar Rp514.060.397,00; realisasi pengawasan sebesar Rp173.266.228,00; dan realisasi dana STAR sebesar Rp957.926.145,00. Rincian penggunaan dana kegiatan pada Biro MKOT tahun 2021 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Penggunaan Dana pada Biro MKOT Triwulan I Tahun 2022

No.	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Anggaran s.d. TW 1 (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
					Tahun 2022	s.d. TW I
A	Kegiatan Rutin					
1	Layanan Perkantoran	100.000.000	24.234.000	13.171.572	13,17	54,35
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	940.500.000	153.584.000	83.080.128	8,83	54,09
3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	484.500.000	121.125.000	158.736.416	32,76	131,05
4	Layanan Reformasi Kinerja	399.016.000	99.754.000	64.204.570	16,09	64,38
5	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	398.974.000	99.743.500	194.887.711	48,84	195,37
	Sub Jumlah Pendukung	2.322.990.000	498.440.500	514.060.397	22,13	103,13
B	Kegiatan Pengawasan dan STAR					
	Hasil Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	1.048.367.000	232.255.050	173.266.228	16,53	74,60
	Sub Jumlah Pengawasan	1.048.367.000	232.255.050	173.266.228	16,53	74,60
1	Hasil Peningkatan Sarana Teknologi Pengawasan	46.966.177.000	-	-	-	-
2	Hasil Kompetensi dan Kebutuhan Institusional berdasarkan Pendekatan E-Learning	6.999.450.000	-	-	-	-
3	Hasil Dukungan Pengelolaan Proyek STAR	13.725.969.000	2.745.000.000	957.926.145	6,98	34,90
4	Hasil Penguatan Institusi melalui Pengembangan Sistem	2.467.222.000	-	-	-	-
	Sub Jumlah STAR	70.158.818.000	2.745.000.000	957.926.145	1,37	34,90
	Sub Jumlah Pengawasan dan STAR	71.207.185.000	2.977.255.050	1.131.192.373	1,59	37,99
	Jumlah	73.530.175.000	3.475.695.550	1.645.252.770	2,24	47,34

2. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian penggunaan SDM pada Biro MKOT triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 132,79%, yang terdiri dari capaian kegiatan rutin Biro MKOT sebesar 151,13%, kegiatan pengawasan Biro MKOT sebesar 89,60%, dan kegiatan STAR sebesar 100%. Realisasi penggunaan SDM pada Biro MKOT secara total pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 9.038 OH atau 132,79% dari target sebesar 6.806 OH. Rincian penggunaan SDM pada Biro MKOT pada triwulan I tahun 2022 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10
Penggunaan SDM pada Biro MKOT Triwulan I Tahun 2022

No.	Rincian Output (RO)	Target		Realisasi (OH)	Capaian (%)	
		Tahun 2022	s.d. TW I		Tahun 2022	s.d. TW I
A	Kegiatan Rutin					
1	Layanan Perkantoran	-	-	-	-	-
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.503	1.244	1.244	27,63	100,00
3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.740	1.185	1.253	26,43	105,74
4	Layanan Reformasi Kinerja	5.100	1.027	1.256	24,63	122,30
5	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.840	960	2.921	76,07	304,27
	Sub Jumlah Pendukung	18.183	4.416	6.674	36,70	151,13
B	Kegiatan Pengawasan dan STAR					
	Hasil Koordinasi Perencanaan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan	1.320	250	224	16,97	89,60
	Sub Jumlah Pengawasan	1.320	250	224	16,97	89,60
1	Hasil Peningkatan Sarana Teknologi Pengawasan	-	-	-	-	-
2	Hasil Kompetensi dan Kebutuhan Instusional berdasarkan Pendekatan E-Learning	558	-	-	-	-
3	Hasil Dukungan Pengelolaan Proyek STAR	8.160	2.140	2.140	26,23	100,00
4	Hasil Penguatan Institusi melalui Pengembangan Sistem	480	-	-	-	-
	Sub Jumlah STAR	9.198	2.140	2.140	23,27	100,00
	Sub Jumlah Pengawasan dan STAR	10.518	2.390	2.364	22,48	98,91
	Jumlah	28.701	6.806	9.038	31,49	132,79

3. Efisiensi Penggunaan Dana dan SDM

a. Efisiensi Penggunaan Dana dan SDM atas Kegiatan Rutin

Penggunaan dana atas kegiatan rutin belum efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sasaran kegiatan Biro MKOT pada triwulan I tahun 2022 yang rerata sebesar 97,74% didukung oleh penggunaan dana sebesar 103,13% dan penggunaan SDM sebesar 151,13%.

b. Efisiensi Penggunaan Dana dan SDM atas Kegiatan Pengawasan dan STAR

Penggunaan dana atas kegiatan pengawasan dan STAR sudah efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 sebesar 100% didukung oleh penggunaan dana sebesar 37,99% dan penggunaan SDM sebesar 98,91%.

Demikian Laporan Kinerja Biro MKOT Triwulan I Tahun 2022 kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Setya Nugraha

**TARGET DAN REALISASI AGRNDA PRIORITAS DUKUNGAN PENGAWASAN BIRO MKOT
TRIWULAN I TAHUN 2022**

NO.	KODE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN (TRIWULAN)				UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	PERMASALAHAN	STRATEGI KE DEPANNYA
					I	II	III	IV			
1	I.a.1	Manajemen Kinerja Pengawasan	Desain Manajemen Pengawasan Terintegrasi	Konvergensi seluruh segmen dan sektor APP 2022	√				<p>Kepala BPKP telah menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022. Konvergensi pengawasan disusun berdasarkan APP Tahun 2022 yang terdiri dari 7 Sektor 29 Tema dan 101 Topik. Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, ditetapkan peran unit kerja sebagai Penanggung Jawab dan Kontributor yang masing-masing peran dapat menjadi unit rendal dengan meng-KF-1-kan ke unit perwakilan. Penetapan konvergensi pengawasan atas peran penanggungjawab Sektor, Tema, dan Topik tertuang pada Keputusan Kepala BPKP Nomor 37/K.SU/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022. Konvergensi pengawasan atas peran Penanggung jawab dan Kontributor tertuang dalam SIMARen PKPT (https://simarenpkpt.bkp.go.id) dan telah dilengkapi dengan informasi pengawasan yang diharapkan sebagai bahan penyusunan SHP pada tiap-tiap unit kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dalam menyusun konvergensi pengawasan, kontributor ditunjuk oleh penanggung jawab topik yang kadang kala pada saat penyusunan konvergensi pengawasan terdapat kelebihan tagging dan atau tidak ditagging oleh Penanggung jawab sebagai kontributor tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan penambahan/pengurangan Saat ini konsep pembagian peran dalam aplikasi adalah penanggung jawab dan kontributor. Kondisi yang sebenarnya terdapat rendal kontributor yang meng KF-1 / mengcascade informasi hasil pengawasan kepada perwakilan. Dalam aplikasi sekarang unit kerja yang melaksanakan KF-1 dari kontributor disetarakan dengan kontributor penanggung jawab. 	Biro MKOT c.q. Bagian Perencanaan sedang menyusun kebijakan konvergensi pengawasan dan mengembangkan desain sistem konvergensi pengawasan sesuai dengan kebutuhan organisasi
2	I.a.2			Keselarasan antara sasaran strategis pada renja dengan APP (Pemetaan SK dan PKPT)	√				<p>Keselarasan antara sasaran strategis pada Renja dengan APP tercermin pada ketepatan pemilihan Rincian Output (RO) atas PKPT APP. Melalui Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-360/SU/03/2022 tanggal 25 Februari 2022, telah disampaikan mapping RO atas topik-topik APP. Aplikasi SIMARen telah dilengkapi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Beberapa unit kerja belum mencermati konvergensi topik APP sehingga menyebabkan kesalahan dalam Mapping RO Beberapa Unit kerja belum mencermati lampiran surat S-360/2022 sehingga terdapat kesalahan mapping 	<ol style="list-style-type: none"> Biro MKOT melakukan reviu dan evaluasi terkait mapping RO. atas hasil reviu dan evaluasi tersebut akan dilakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dan

NO.	KODE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN (TRIWULAN)				UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	PERMASALAHAN	STRATEGI KE DEPANNYA
					I	II	III	IV			
									fitur mapping RO.	RO	Pihak-pihak terkait. 2. Diskusi dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan unit kerja
3	I.a.3			Keselarasn KAP dan PKPT dengan APP	√				Aplikasi SIMARen telah dilengkapi fitur untuk menyelaraskan antara KAP dan PKPT dengan APP	-	updating aplikasi SIMARen sesuai kebutuhan organisasi
4	I.a.4			Kesesuaian komposisi penganggaran dengan rencana pengawasan (PKPT)	√				Komposisi anggaran Tahun 2022 disesuaikan dengan rencana pengawasan. Sekretaris utama telah menerbitkan Surat Nomor S-360/SU/03/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Anggaran Unit Kerja Tahun 2022 untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan kebijakan pengawasan (APP dan APPD) Tahun 2022. Selain itu Sekretaris Utama BPKP juga menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-3/SU/01/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran yang didalamnya memuat tentang komposisi penggunaan sumber daya pengawasan.	Terdapat risiko dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-3/SU/01/2022 tanggal 16 Maret 2022	Melaksanakan pemantauan atas perencanaan dengan mempertimbangkan capaian.kinerja.
5	I.a.5			Konsep Integrasi Data Manajemen Pengawasan	√	√	√	√	Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, Biro MKOT sedang menyusun draft Desain Manajemen Kinerja Pengawasan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan dengan mencermati proses bisnis BPKP. Desain Manajemen Kinerja Pengawasan tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam konsep integrasi data manajemen pengawasan.	-	Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten membidangi manajemen kinerja pengawasan dan Pusinfowas BPKP.

NO.	KODE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN (TRIWULAN)				UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	PERMASALAHAN	STRATEGI KE DEPANNYA
					I	II	III	IV			
6	I.b.2		Perencanaan dan Penganggaran Pengawasan	Mekanisme revisi PKPT APP	√				Mekanisme revisi PKPT atas APP tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-3/SU/01/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran		Melakukan pemantauan perencanaan dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab topik dan unit rendal dan memastikan konvergensi pengawasan
7	I.b.3		Pemetaan dan pemerataan beban kerja dan RMP	Mekanisme pemetaan dan pemerataan beban kerja dan RMP tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-3/SU/01/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran	√						
8	I.c.1		Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Monitoring RPL dan RMP	√	√	√	√	Biro MKOT menghadapi hambatan pada pelaksanaan monitoring yakni terdapat perubahan struktur APP Tahun 2022 yang harus diakomodir SIMA 4.0. Oleh karena itu, pada Triwulan 1 dilakukan <i>enhancement</i> melalui aplikasi new monsima terkait APP dan PKPT.	-	Memastikan pada aplikasi SIMA sudah mencakup pengawasan APP dengan timeline yang sesuai (RMP-RPL) dan melakukan penguatan kolaborasi pengembangan tools pemantauan APP tahun 2022 antara Biro MKOT, Pusinfowas, dan tim pengembang terkait.
9	I.c.2		Pemantauan sequencing hasil pengawasan kontributor dan sintesisnya	Hasil pemantauan SHP triwulan I/2022 disampaikan melalui surat Kepala Biro MKOT OT.2/5-263/SU01/2/2022 tanggal 23 Maret 2022.	√	√	√	√		-	Akan dilakukan evaluasi kualitas SHPdibandingkan Lappres TW I/2022.
10	I.d.1		Analisa dan Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Mekanisme Sintesa Hasil Pengawasan Strategis	√				Mekanisme penyelesaian SHP tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-3/SU/01/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran	-	Akan disusun pedoman penyusunan SHP.
11	I.d.3			Mekanisme pengusulan PKPT pengganti APP	√				Mekanisme pengusulan PKPT pengganti APP tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-3/SU/01/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kebijakan Teknis Manajemen Kinerja dan Anggaran	-	koordinasi dengan penanggung jawab topik APP

NO.	KODE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN (TRIWULAN)				UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	PERMASALAHAN	STRATEGI KE DEPANNYA
					I	II	III	IV			
12	I.d.4			Ikhtisar Hasil Pengawasan	√	√	√	√	Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP) triwulan I/2022 telah direviu dan akan disampaikan kepada Presiden pada tanggal 11 April 2022.	-	
13	II.b.1	Manajemen SDM	Analisis Beban Kerja	Pemetaan beban kerja dan komposisi SDM	√	√	√	√	Melakukan penyusunan uraian jabatan yang akan digunakan Biro SDM sebagai dasar penyesuaian Standar Kompetensi Jabatan.	-	
14	IV.a.1	Tata Kelola Pengawasan	Proses Bisnis Pengawasan	Pendampingan Penyusunan Pedoman & SOP sintesa pengawasan	√	√	√	√	<ol style="list-style-type: none"> Dalam rangka mendukung pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022 BPKP, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola (MKOT) selaku pemantau dan pengelola pedoman pengawasan yang dibuat oleh unit Rendal, membuat sebuah modul aplikasi pemantauan atas <i>due process</i> penyusunan pedoman APP Tahun 2022 Validasi KAK telah berjalan dan menghasilkan 7 hasil validasi terhadap KAK yang diajukan oleh unit kerja rendal penanggung jawab melalui Aplikasi E-TOP. Adapun KAK Pedoman yang sudah dilakukan validasi adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> KAK Pedoman Topik APP Pembangunan Bandara Tahun 2022; KAK Pedoman Penyusunan Topik APP Pembangunan Jalur Kereta Api Tahun 2022; KAK Pedoman Topik APP Pembangunan Pelabuhan Tahun 2022; KAK Pedoman Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) TA 2022; KAK Pedoman Pengawasan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Non-APP); f) 	-	<ol style="list-style-type: none"> Mempercepat penyelesaian Kajian Pedoman Penyusunan Pedoman dan Menyusun Kebijakan Pedoman Penyusunan Pedoman. Mempercepat pelaksanaan validasi SOP dan KAK Pedoman. Mengawal dan mendorong penyusunan pedoman terkait APP

NO.	KODE	TEMA	TOPIK	HASIL YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN (TRIWULAN)				UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	PERMASALAHAN	STRATEGI KE DEPANNYA
					I	II	III	IV			
									<p>KAK Pedoman Topik APP Penanganan Covid-19 - Pengadaan Barang dan Jasa; dan g. KAK Pedoman Pengawasan Optimalisasi Program Padat Karya.</p> <p>3. Sampai dengan Triwulan I 2022 Biro MKOT telah melaksanakan validasi SOP sebanyak 12 SOP Bagian PPKO, dan 19 SOP Bagian SPIP RB Biro MKOT. Bagian Organisasi dan Tata Laksana membantu dalam pengesahan SOP milik Bagian PPKO menjadi Surat Keputusan Sesma. Untuk SOP Bagian SPIP RB saat ini sedang dalam pengajuan draf Surat Keputusan Sesma</p>		
15	V.a.1	Pengendalian Internal	Pengawasan atas Tata Kelola	Penyusunan risiko pengawasan APP dan risiko dukungan pengawasan	√				Menyusun <i>Term of Reference</i> (ToR) <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) risiko pengawasan APP dan risiko dukungan pengawasan dalam rangka pengajuan ABT.	belum ada anggaran <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) risiko pengawasan APP dan risiko dukungan pengawasan	melakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan untuk mengetahui progres persetujuan ABT
16	V.a.2			Pemantauan indikator risiko pengawasan APP	√	√	√	√	memasukkan konteks APP ke dalam aplikasi manajemen risiko (Bewise)	belum dilakukan analisis atas risiko.	melakukan pengendalian dan keterjadian atas risiko APP
17	V.a.3			Mitigasi risiko pelaksanaan penguasaan	√	√	√	√	memutakhirkan kamus risiko dan register risiko sesuai SAPA Enablers 2022	belum dilakukan pemantauan atas risiko unit kerja tersebut	melakukan pemantauan atas risiko unit kerja terkait APDP
18	VIII.a.2	Publikasi Hasil Pengawasan	Distribusi hasil pengawasan kepada stakeholders	Penyampaian hasil pengawasan tepat waktu	√	√	√	√	IHP triwulan I/2022 akan didistribusikan kepada seluruh kepala unit kerja. Proses cetak dan distribusi dilakukan bekerja sama dengan Biro Umum.	-	